

ABSTRAKSI

Perang saudara yang terjadi di Somalia menimbulkan berbagai akibat, di antaranya banyak rakyat Somalia yang menderita kelaparan. Melihat penderitaan rakyat Somalia yang berkepanjangan tersebut, maka menggugah Amerika Serikat beserta sekutunya untuk melakukan misi kemanusiaan, yaitu membantu rakyat Somalia yang menderita kelaparan dan menyelesaikan perang saudara yang berkecamuk. Pasukan Amerika Serikat dan sekutunya itu dikenal dengan pasukan Unified Task Force (UNITAF).

Misi yang dilakukan oleh pasukan UNITAF, banyak mendapat tantangan dari rakyat Somalia itu sendiri. Keberadaan pasukan gabungan Amerika Serikat atau UNITAF di Somalia dalam rangka misi kemanusiaan yaitu membantu rakyat Somalia yang menderita kelaparan akibat perang saudara yang berkepanjangan, tentunya didasarkan atas suatu kewenangan tertentu. Selama ini untuk menyelesaikan setiap permasalahan internasional harus didasarkan pada suatu aturan seperti halnya resolusi PBB. Begitu juga halnya dengan upaya yang dilakukan oleh pasukan UNITAF dalam memberikan bantuan kelaparan yang berkepanjangan akibat perang saudara tersebut juga tentunya didasarkan atas aturan hukum internasional yang ada, apalagi tindakan pasukan UNITAF lebih jauh yaitu melaku-

kan serangan bersenjata terhadap rakyat Somalia dicurigai sebagai pemberontak.

Pasukan UNITAF itu sendiri melakukan upaya penyelesaian atas sengketa bersenjata yang terjadi di Somalia yang membawa akibat kelaparan bagi rakyat Somalia didasarkan pada resolusi No. 794 Tahun 1992 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) yang menentukan bahwa, penderitaan manusia yang berkepanjangan di Somalia (Afrika Timur) telah menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keselamatan dunia. Dengan mendasarkan ketentuan resolusi No. 794 Tahun 1992 Dewan Keamanan PBB tersebut, maka pasukan UNITAF melakukan berbagai macam tindakan dengan maksud segera menyelesaikan kemelut yang terjadi di Somalia. Padahal kalau diperhatikan tindakan yang dilakukan oleh Pasukan UNITAF seharusnya adalah membantu rakyat Somalia yang menderita kelaparan akibat perang saudara, dimana pasukan UNITAF berusaha melakukan penangkapan terhadap Jendral Muhammad Farah Aideed yang dianggap sebagai biang pemberontakan di Somalia. Hal ini jelas merupakan intervensi yang dilakukan oleh pasukan UNITAF terhadap Somalia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan adalah : "Sampai sejauhmanakah kewenangan pasukan UNITAF dikaitkan dengan pembentukannya dalam memberikan bantuan kemanusiaan

terhadap rakyat Somalia ?.

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan beberapa tahap atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 2 minggu
- Fase pengumpulan data : 3 minggu
- Fase pengolahan data : 1 bulan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah secara yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan pada ketentuan hukum internasional yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji, dalam hal ini Piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 794 Tahun 1992.

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer antara lain Piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB No. 794 Tahun 1992 dan konvensi-konvensi internasional.
- Bahan hukum sekunder, antara lain berupa buku-buku literatur dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Sebagai penunjang, data dalam skripsi ini juga diperoleh dari United State Information Service (USIS) di Surabaya.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari kedua bahan hukum

Presiden Siad Barre melarikan diri, maka hal ini merupakan kesempatan bagi Ali Mahdi untuk memaklumkan diri menjadi Presiden Somalia.

Kalau diperhatikan tindakan yang dilakukan oleh UNITAF berusaha menyelesaikan sengketa yang terjadi di Somalia adalah dengan jalan intervensi, yaitu secara langsung masuk ke dalam wilayah Somalia guna memberikan bantuan kepada rakyat Somalia agar tidak menderita kelaparan akibat terjadinya sengketa antara kelompok Ali Mahdi dengan kelompok Jendral Muhammad Farah Aideed. Adapun dasar kewenangan UNITAF memberikan bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Somalia adalah resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu pasal 24 dan pasal 40 Piagam PBB.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya yaitu memberikan bantuan kemanusiaan rakyat Somalia ternyata mendapat hambatan. Adapun hambatan tersebut timbul karena bantuan kemanusiaan itu disabotase oleh pasukan Jendral Muhammad Farah Aideed. Sabotase itu sendiri disertai dengan penyerangan terhadap pasukan UNITAF. Dengan adanya penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Jendral Muhammad Farah Aideed, maka pihak UNITAF membalas serangan guna mempertahankan diri.

Pembalasan penyerangan oleh pasukan UNITAF terhadap rakyat Somalia yang pro Jendral Muhammad Farah

yang ada, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Selain itu juga melakukan wawancara dengan pimpinan United State Information Service di Surabaya.

Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode pengolahan data yang bertolak dari prinsip yang umum menuju prinsip yang khusus dalam arti bahwa ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam Piagam PBB akan ditetapkan secara khusus terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan jalan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang dikaji dengan berdasarkan pada pemikiran logis, nalar, rinci dan runtut sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analistik.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan di United State Information Service (USIS) di Surabaya.

Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa sengketa antar faksi yang terjadi di Somalia berawal dari masuknya Muhammad Farah Aideed akhir tahun 1990 ke Somalia untuk memerangi Presiden Siad Barre. Awal tahun 1991 Jendral Muhammad Farah Aideed masuk menyerang Mogadishu bersama pasukannya dan Presiden Siad Barre melarikan diri. Dalam melakukan penyerangan tersebut dibantu oleh sekutunya yaitu Ali Mahdi. Melihat

Aideed merupakan penyimpangan terhadap tugas UNITAF yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB dengan dasar resolusi No. 794. Sehingga pada akhirnya sengketa atau pertikaian yang terjadi di Somalia bukan lagi merupakan sengketa internasional, karena telah melibatkan pasukan UNITAF. Hal ini perlu adanya upaya penyelesaian agar sengketa tersebut tidak berlarut-larut dan berkepanjangan karena hal ini akan semakin menjadikan rakyat Somalia sengsara.

Pada dasarnya dalam pembentukan pasukan UNITAF untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Somalia tidak bertentangan dengan pasukan PBB karena UNITAF melakukan tindakan di Somalia berdasarkan pada ketentuan hukum internasional yang berlaku, yaitu pasal 1 ayat 1 Piagam PBB dan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 794, walaupun akibatnya yang timbul tidak sesuai dengan yang diharapkan semula.